

BAB I

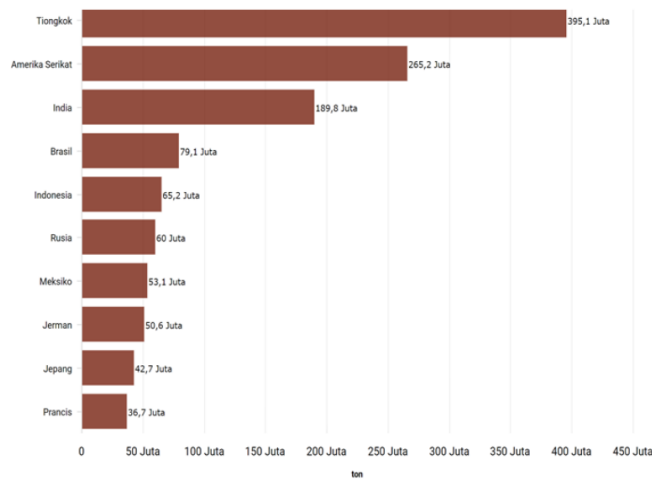
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan residu dari aktivitas manusia yang volumenya terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan timbulan sampah yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, serta berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah menjadi salah satu isu penting dalam tata kelola lingkungan yang memerlukan keterlibatan berbagai aktor kelembagaan serta dukungan kapasitas organisasi yang memadai.

Permasalahan sampah telah bertransformasi dari sekadar isu sanitasi lokal menjadi krisis ekologis global yang mengancam keberlanjutan lingkungan. Laporan dunia sering kali menyoroti bahwa ledakan timbulan sampah di negara-negara berkembang merupakan cerminan dari krisis kapasitas kelembagaan. Di Indonesia, meskipun pemerintah pusat telah menetapkan target ambisius melalui Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) untuk mencapai pengelolaan sampah 100% pada tahun 2025, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah antara regulasi dan implementasi. Adapun data negara penghasil sampah terbanyak di dunia, sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Negara Penghasil Sampah Terbanyak di Dunia Tahun 2023



Sumber: *The Atlas of Sustainable Development Goals, 2023*

Berdasarkan data di atas, menurut data *The Atlas of Sustainable Development Goals 2023* yang dirilis oleh World Bank (2023), Indonesia berada di urutan kelima sebagai negara penghasil sampah terbesar di dunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, dan Brasil dengan produksi sampah mencapai 65,2 juta ton.

Permasalahan sampah saat ini tidak hanya menjadi isu lokal, tetapi telah berkembang menjadi persoalan global. Laporan *What a Waste 2.0* yang diterbitkan oleh World Bank menunjukkan bahwa produksi sampah dunia mencapai sekitar 2,01 miliar ton per tahun dan diperkirakan akan meningkat hingga 3,4 miliar ton pada tahun 2050 seiring dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan konsumsi masyarakat. Peningkatan volume sampah tersebut berimplikasi pada meningkatnya tekanan terhadap sistem pengelolaan lingkungan di berbagai negara, khususnya di

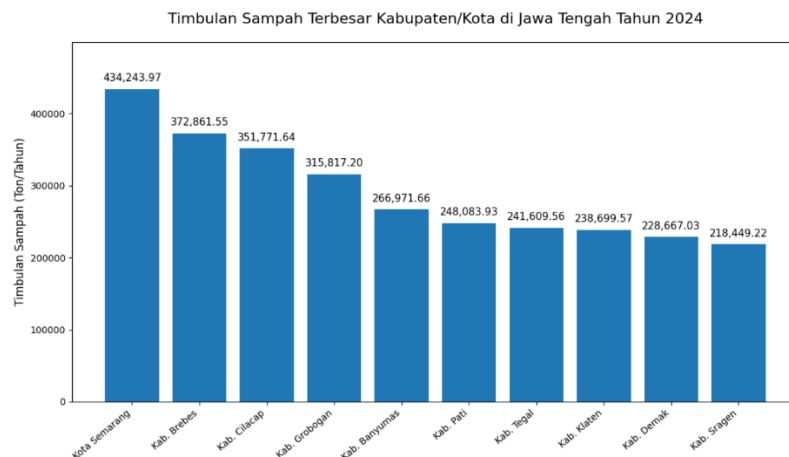
negara berkembang yang masih menghadapi keterbatasan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur pengelolaan sampah.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang pesat, turut menghadapi tantangan serupa. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa timbulan sampah nasional terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu provinsi dengan kontribusi timbulan sampah yang cukup tinggi adalah Jawa Tengah yang mencapai sekitar 16 ribu ton per hari atau lebih dari 5,9 juta ton per tahun. Tingginya volume sampah tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan yang efektif serta kapasitas kelembagaan yang kuat di tingkat pemerintah daerah. Tanpa adanya dukungan kapasitas organisasi yang memadai, peningkatan timbulan sampah berpotensi menimbulkan tekanan besar terhadap sistem layanan persampahan di daerah. Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, menjadi potret nyata di mana kapasitas pemerintah daerah terus diuji oleh produksi sampah yang terus meningkat. Kegagalan dalam mengelola volume yang masif ini bukan disebabkan oleh ketiadaan teknologi semata, melainkan oleh terbatasnya kemampuan organisasi dalam membangun sistem yang adaptif, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika pertumbuhan penduduk yang cepat.

Kondisi tersebut tercermin secara nyata di Kabupaten Brebes yang merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah. Adanya jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 2 juta jiwa, Kabupaten Brebes

menghasilkan timbulan sampah sebesar 372.861.55 ton per tahun. Namun, tingginya angka timbulan ini tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan sistem pengelolaan yang sebanding, sebagaimana terlihat pada kondisi TPA Kaliwlingi yang telah mengalami *overload*. Adapun data timbulan sampah berdasarkan kota/kabupaten di Jawa Tengah tahun 2024, sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Timbulan Sampah Terbesar Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2024



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa timbulan sampah di Kabupaten Brebes pada tahun 2024 mencapai sekitar 372.861.55 ton per tahun sehingga menempatkan daerah ini sebagai salah satu kabupaten dengan timbulan sampah terbesar di Jawa Tengah. Besarnya timbulan sampah tersebut berkaitan erat dengan jumlah penduduk Kabupaten Brebes yang mencapai sekitar 2.065.500 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,10% per tahun.

Ketidakmampuan dalam mengelola volume sampah yang masif ini menimbulkan dampak domino. Penumpukan sampah di TPA yang masih menggunakan sistem *open dumping* memicu produksi air lindi yang berisiko mencemari akuifer air tanah dangkal. Secara sosial, hal ini mengancam kesehatan masyarakat dan menurunkan produktivitas sektor pertanian serta tambak yang menjadi sandaran ekonomi warga lokal di sekitar pesisir Brebes.

Fenomena krisis sampah di Kabupaten Brebes ini memberikan sinyal kuat bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar kendala teknis operasional, melainkan indikasi dari lemahnya kapasitas kelembagaan. Kesenjangan antara volume sampah yang masuk dengan kemampuan olah Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan perlunya penguatan pada dimensi sumber daya manusia, sistem perencanaan strategis, hingga pola jaringan kerja sama antaraktor. Tanpa pengembangan kapasitas yang sistemik, upaya penanganan sampah akan terus bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan.

Kabupaten Brebes merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di Jawa Tengah sehingga besarnya populasi ini membawa tekanan masif terhadap daya dukung lingkungan melalui timbulan sampah yang mencapai 372.861.55 ton per tahun. Angka ini bukan sekadar statistik teknis, melainkan cerminan dari tantangan manajerial yang harus dijawab oleh pemerintah daerah. Kesenjangan yang lebar antara volume sampah dengan rendahnya rasio pelayanan menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam merespons dinamika kependudukan secara adaptif. Manifestasi dari keterbatasan kapasitas kelembagaan

tersebut terlihat nyata pada kondisi operasional TPA Kaliwlingi yang saat ini telah melampaui ambang batas daya tampung (*overload*). TPA Kaliwlingi yang memiliki luas lima hektar ini sangat kritis dengan tumpukan sampah setinggi 20 meter dan hampir mencapai kapasitas maksimum. Keterbatasan ruang menjadi masalah utama yang dihadapi dan diperkirakan kapasitas TPA Kaliwlingi habis pada tahun 2023. Keberadaan TPA Kaliwlingi yang hanya 2 km dari tepi pantai dan memiliki muka air tanah setinggi 2 meter sehingga menimbulkan risiko pencemaran air akibat polutan TPA.

Tingginya angka timbulan tersebut menjadi bukti empiris bahwa terdapat ketimpangan antara laju produksi sampah masyarakat dengan kapasitas manajerial pemerintah daerah dalam melakukan pengolahan. Keterbatasan lahan dan teknologi di TPA tersebut bukan sekadar masalah teknis, melainkan representasi dari lemahnya perencanaan strategis dan keterbatasan daya adaptasi kelembagaan dalam mengantisipasi ledakan populasi. Akibatnya, defisit layanan ini termanifestasi secara konkret melalui pencemaran cairan lindi yang mengancam akuifer air tanah dangkal serta produktivitas sektor unggulan, seperti tambak dan pertanian. Oleh karena itu, urgensi penyelesaian masalah ini tidak lagi terletak pada penambahan sarana fisik semata, melainkan pada restrukturisasi dan pengembangan kapasitas kelembagaan guna menciptakan sistem tata kelola sampah yang responsif dan berkelanjutan.

Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,10% per tahun juga berdampak pada meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Angka timbulan sampah yang

mencapai ratusan ribu ton per tahun ini bukan sekadar deretan data statistik di atas kertas, melainkan representasi dari beban lingkungan nyata yang harus dipikul oleh wilayah Kabupaten Brebes setiap harinya. Akumulasi volume sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengangkutan ini menciptakan titik-titik tumpukan liar di bahu jalan dan aliran sungai, yang secara langsung mulai menggerus kualitas kesehatan lingkungan pemukiman warga. Akumulasi sampah yang tidak terkelola menciptakan risiko lingkungan serius, mulai dari pencemaran air lindi yang merembes ke sumber air tanah warga hingga polusi udara akibat gas metana yang memicu gangguan kesehatan pernapasan kronis. Dampak ekologis ini secara langsung menciptakan eksternalitas negatif bagi tatanan sosial masyarakat sehingga kerentanan terhadap penyakit dan penurunan kualitas lingkungan menjadi beban yang harus ditanggung warga akibat sistem pengelolaan yang tidak berjalan.

Selain itu, kondisi ini juga dapat menimbulkan risiko ekologis yang sangat serius bagi ekosistem pesisir. Penumpukan sampah tanpa pelapisan tanah penutup mengakibatkan produksi cairan lindi (*leachate*) yang mengandung logam berat merembes langsung ke dalam akuifer air tanah. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat muka air tanah di sekitar pesisir TPA Kaliwlingi cukup dangkal. Pencemaran ini tidak hanya menurunkan kualitas air bersih yang dikonsumsi warga, tetapi juga mengancam produktivitas lahan pertanian dan tambak di sekitar TPA. Polusi lindi yang masuk ke ekosistem perairan dapat merusak rantai makanan hayati laut yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat nelayan di wilayah tersebut.

Kegagalan dalam mengelola ekosistem hilir ini mencerminkan lemahnya jembatan antara kebijakan strategis dan implementasi teknis, di mana Dinas Lingkungan Hidup belum mampu secara optimal mengelola rantai layanan persampahan dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk membedah kapasitas kelembagaan yang ada. Hal ini karena tanpa adanya penguatan pada level organisasi dan regulasi, risiko sosial-lingkungan ini akan terus meluas dan menjadi krisis kemanusiaan yang lebih besar di Kabupaten Brebes.

Apabila permasalahan ini tidak segera ditangani melalui penguatan kapasitas kelembagaan yang komprehensif, Kabupaten Brebes berada dalam bayang-bayang krisis sampah sistemik. Risiko ini tidak hanya terbatas pada penumpukan fisik di TPA Kaliwlingi. Namun, akan berkembang menjadi krisis kesehatan publik akibat merebaknya penyakit bawaan lingkungan serta krisis ekonomi bagi sektor agraris dan perikanan yang menjadi tulang punggung daerah. Tanpa intervensi kebijakan yang adaptif dan peningkatan kapasitas manajerial pada Dinas Lingkungan Hidup, kegagalan pengelolaan sampah ini akan mencapai titik kritis di mana degradasi lingkungan menjadi tidak terkendali yang pada akhirnya akan menghambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Brebes.

Data statistik ini tidak boleh dipandang hanya sebagai masalah kekurangan armada atau keterbatasan lahan TPA semata, melainkan menjadi bukti empiris atas kegagalan sistem organisasi dalam mengantisipasi dinamika kependudukan dan

perubahan pola konsumsi masyarakat. Ketidakmampuan sistem dalam menjangkau sekitar 78% wilayah layanan mengindikasikan adanya disfungsi pada elemen kunci kelembagaan, mulai dari kegagalan perencanaan strategis yang tidak selaras dengan beban kerja, kelemahan manajerial dalam pengalokasian sumber daya, hingga inersia regulasi yang menghambat terciptanya sinergi antar-aktor. Oleh karena itu, kegagalan sistemik ini menegaskan bahwa solusi yang dibutuhkan bukan sekadar penambahan fasilitas fisik secara parsial, melainkan sebuah restrukturisasi dan pengembangan kapasitas kelembagaan yang menyeluruh agar organisasi mampu bergerak secara responsif terhadap krisis persampahan di Kabupaten Brebes. Penambahan armada pengangkut atau perluasan lahan TPA tidak akan pernah menjadi solusi permanen apabila tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas kelembagaan yang mumpuni. Kegagalan dalam mengelola dampak lingkungan, seperti pencemaran lindi dan penurunan kesehatan masyarakat sebenarnya merupakan cerminan dari lemahnya kapasitas manajerial, rendahnya efektivitas regulasi, serta rapuhnya koordinasi antar-aktor dalam sistem pengelolaan sampah daerah.

Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa sarana fisik pengelolaan sampah hanyalah instrumen statis yang efektivitasnya sangat bergantung pada penggerakannya, yaitu lembaga yang berwenang. Dampak negatif yang terjadi saat ini mengonfirmasi bahwa terdapat kesenjangan kapasitas (*capacity gap*) pada Dinas Lingkungan Hidup, terutama dalam aspek perencanaan strategis dan sinkronisasi kebijakan. Oleh karena itu, fokus penyelesaian harus diarahkan pada

pengembangan kapasitas kelembagaan guna memastikan bahwa setiap sumber daya fisik dan anggaran dapat dikelola secara optimal, adaptif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, degradasi lingkungan yang terjadi di sekitar TPA Kaliwlingi bukan sekadar konsekuensi dari tingginya timbulan sampah, melainkan implikasi logis dari belum optimalnya kapasitas kelembagaan dalam merespons dinamika permasalahan sampah yang ada. Hal inilah yang mendasari pentingnya studi mengenai pengembangan kapasitas kelembagaan sebagai kunci utama dalam memutus rantai permasalahan sampah di Kabupaten Brebes.

Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan berbagai regulasi terkait pengelolaan sampah, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat operasional. Peningkatan timbulan sampah dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa sistem pengelolaan yang ada belum sepenuhnya mampu mengimbangi dinamika perkembangan wilayah.

Permasalahan pengelolaan sampah pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dalam mengelola sistem pelayanan persampahan secara efektif. Pengelolaan sampah melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah daerah, perangkat desa, sektor swasta, hingga masyarakat. Tanpa adanya koordinasi

kelembagaan yang kuat, peningkatan timbulan sampah akan terus menjadi beban yang sulit diatasi oleh satu institusi saja.

Pada praktiknya, pengelolaan sampah di daerah seringkali masih dipersepsikan sebagai tanggung jawab tunggal Dinas Lingkungan Hidup, padahal kompleksitas permasalahan sampah membutuhkan keterlibatan lintas sektor serta dukungan kelembagaan yang terintegrasi. Fragmentasi koordinasi antarinstansi serta keterbatasan kapasitas organisasi dapat menyebabkan kebijakan pengelolaan sampah tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat daerah.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Brebes jumlah penduduk tahun 2024 sebesar 2.065.500 Jiwa, maka timbulan sampah harian di Kabupaten Brebes pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 1.021,54 ton per hari. Sementara itu, total volume sampah yang berhasil terangkut diangkut ke TPA Kaliwlingi baru sekitar 225,25 ton per hari. Sementara sisanya ada yang dikelola oleh masyarakat melalui berbagai inisiatif pengelolaan mandiri serta ada juga sampah yang belum tertangani secara memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes, baik dari aspek sumber daya manusia, anggaran maupun sarana prasarana menjadi hal yang mendesak untuk segera dilakukan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rasio pengangkutan sampah baru mencapai sekitar 22,05 persen dari total timbulan sampah harian. Artinya, masih

terdapat sekitar 77,95 persen timbulan sampah yang belum tertangani secara optimal melalui sistem formal pengelolaan persampahan. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa kapasitas layanan persampahan masih perlu ditingkatkan.

Jika kondisi ini tidak segera diatasi, potensi penumpukan sampah di sumber maupun di lingkungan permukiman akan semakin meningkat. Hal ini dapat menimbulkan risiko pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan maupun operasional pengelolaan sampah.

Lonjakan timbulan sampah di Kabupaten Brebes yang semakin meningkat pada dasarnya bukan sekadar beban fisik bagi lahan TPA Kaliwlingi, melainkan merupakan beban manajerial yang menguji sejauh mana fungsi koordinasi antar-instansi berjalan. Realita di lapangan menunjukkan adanya egosektoral dimana penanganan sampah seringkali dianggap sebagai tugas tunggal Dinas Lingkungan Hidup semata. Padahal besarnya volume sampah tersebut membutuhkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari Bappeda dalam perencanaan anggaran makro, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) untuk penguatan TPS 3R di level desa, hingga keterlibatan masyarakat di daerah. Tanpa adanya jembatan koordinasi yang kokoh, data timbulan sampah yang besar ini akan terus menjadi masalah yang tidak terkelola akibat rantai birokrasi yang terfragmentasi.

Rendahnya rasio layanan pengelolaan sampah serta kondisi TPA Kaliwlingi yang *overload* dengan sistem *open dumping* bukan sekadar persoalan teknis operasional di lapangan. Fenomena ini merupakan indikator kuat adanya

kelemahan pada level kapasitas kelembagaan. Kondisi teknis di lapangan merupakan cerminan dari tantangan kapasitas kelembagaan yang kompleks. Hal ini tidak hanya melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pengelola teknis, tetapi juga berkaitan dengan koordinasi lintas sektoral, dukungan regulasi tingkat daerah, serta komitmen alokasi sumber daya dari pemerintah daerah secara keseluruhan. Lemahnya jembatan antara kebijakan dan implementasi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas harus dilakukan secara sistemik, melibatkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian masalah sampah di Kabupaten Brebes tidak cukup hanya dengan menambah armada atau memperluas lahan TPA, melainkan harus menyentuh akar masalahnya yaitu penguatan kapasitas kelembagaan agar mampu menciptakan sistem pengelolaan yang adaptif dan berkelanjutan.

Di era transformasi digital, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes masih terjebak pada pola pengelolaan sampah konvensional yang minim inovasi teknologi. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena sangat penting untuk mengetahui seberapa siap organisasi untuk mengadopsi sistem manajemen sampah berbasis data yang juga dikenal sebagai digitalisasi layanan. Untuk meningkatkan kapasitas bukan hanya menambah armada, tetapi juga membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau timbulan sampah secara real-time untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang cerdas (*smart environment*).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat dalam penyelenggaraan urusan persampahan memegang peran

strategis dalam pengendalian dan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Brebes. Secara substantif, DLH Kabupaten Brebes mengendalikan seluruh rantai layanan persampahan, mulai dari perumusan kebijakan dan perencanaan, penyediaan sarana dan prasarana, pengoperasian pengangkutan, hingga pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Selain menjalankan fungsi operasional, DLH juga berperan sebagai koordinator yang menghubungkan pemerintah desa/kelurahan, pelaku usaha, serta masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah. Tanpa kapasitas yang memadai baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur pengelolaan sampah berpotensi berjalan secara parsial dan kurang terintegrasi.

Selain itu, DLH Kabupaten Brebes memiliki kewenangan pengawasan dan pembinaan, termasuk dalam mendorong pengurangan sampah di sumber melalui program TPS 3R, bank sampah, serta kemitraan dengan sektor swasta. Posisi strategis tersebut menjadikan kinerja DLH Kabupaten Brebes sangat menentukan tingkat pelayanan persampahan di daerah. Namun demikian, capaian layanan yang rendah dari total timbulan menunjukkan bahwa kapasitas operasional DLH Kabupaten Brebes belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan volume sampah. Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan penguatan pada aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta tata kelola layanan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan DLH Kabupaten Brebes menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan

mengurangi kesenjangan antara timbulan dan sampah yang tertangani di Kabupaten Brebes.

Kapasitas kelembagaan penting untuk organisasi pelayanan publik karena dapat memperkuat internal organisasi melalui berbagai komponen yang saling berpengaruh dan berinteraksi Fatimah (Abidin, 2021). Aspirasi, strategi, sumber daya manusia, keterampilan organisasi, struktur organisasi, budaya, dan sistem dan infrastruktur adalah beberapa komponen penting dari kapasitas kelembagaan tersebut. Kapasitas kelembagaan menjadi masalah utama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes karena kelembagaan merupakan pondasi utama bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh aktivitas pengelolaan sampah. Ketika lembaga yang bertanggung jawab, seperti UPTD Pengelolaan Sampah dan Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki kapasitas yang memadai maka sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan akan terganggu.

Penelitian terkait analisis kapasitas kelembagaan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes menjadi penting dilakukan karena secara empiris terdapat kesenjangan yang signifikan antara target dan capaian pelayanan persampahan di Kabupaten Brebes. Pada tahun 2023, indikator cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Brebes menetapkan target sebesar 30,8%. Namun, realisasi capaian hingga akhir tahun tersebut baru mencapai 21,38%, atau sekitar 70,10% dari target yang ditetapkan. Berdasarkan klasifikasi kinerja, capaian ini termasuk dalam kategori sedang. Secara operasional, volume total sampah yang berhasil diangkut dan dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir TPA Kaliwlingi Brebes tercatat sebesar

225,25 ton per hari. Tingginya volume tersebut, rasio pengangkutan sampah terhadap total timbulan sampah di Kabupaten Brebes baru mencapai 21,38%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah yang dihasilkan belum tertangani secara optimal sehingga menjadi tantangan penting dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan terkait pelayanan persampahan di Kabupaten Brebes.

Dinas Lingkungan Kabupaten Brebes sebagai institusi pengampu kebijakan dan pelaksana teknis pengelolaan sampah memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan sistem persampahan daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana kapasitas kelembagaan DLH Kabupaten Brebes, baik dari sisi sumber daya manusia, struktur organisasi, kapasitas keuangan, jaringan kerja sama, maupun sistem perencanaan dan pengembangan. Maka dari itu, penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat kinerja DLH Kabupaten Brebes, serta merumuskan strategi perbaikan yang konkret guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan persampahan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam mendorong pencapaian target nasional pengelolaan sampah sesuai amanat Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas.

Gambar 1. 3 Kondisi TPA Kaliwlingi



Sumber: tvOnenews.com (2025)

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa TPA Kaliwlingi yang terlalu penuh dengan tumpukan sampah yang menutupi pintu masuk dan keluar serta pencemaran tanah di sekitar TPA yang berdampak pada penduduk di daerah sekitar TPA. Selain itu, kondisi jalan tanah yang masih digunakan untuk menuju TPA Kaliwlingi membahayakan kendaraan pengangkut sampah dan mengganggu operasi pengelolaan sampah. Terbatasnya lahan dan fasilitas pendukung TPA Kaliwlingi juga menjadi penyebab operasi pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik, serta tidak adanya sistem pengolahan sampah yang memadai untuk mengurangi volume sampah yang masuk dan memperpanjang jangka waktu operasi TPA Kaliwlingi.

Gambar 1. 4 Kondisi jalan TPA Kaliwlingi



Sumber: harianbrebes.com (2021)

Kondisi ideal pengelolaan TPA Kaliwlingi seharusnya mencakup ketersediaan lahan yang memadai sesuai dengan proyeksi volume sampah jangka panjang sehingga tidak terjadi penumpukan sampah yang melebihi kapasitas. Selain itu, TPA perlu dilengkapi dengan sistem pengolahan sampah yang terintegrasi, seperti fasilitas pemilahan, daur ulang, komposting untuk sampah organik, serta teknologi pengolahan residu, seperti insinerator. Sistem *sanitary landfill* juga perlu diterapkan, yakni dengan memadatkan dan melapisi sampah secara berkala serta menyediakan sistem pengendalian lindi dan gas metana guna mencegah pencemaran lingkungan.

Pengelolaan operasional yang baik juga membutuhkan dukungan infrastruktur dan fasilitas pendukung, seperti alat berat, akses jalan yang layak, serta tenaga kerja yang terlatih dan memiliki standar operasional prosedur yang jelas. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya juga sangat penting untuk mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA sehingga

pengelolaan TPA Kaliwlingi dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan berkelanjutan.

Sebagai tahap akhir pengelolaan sampah, TPA harus memiliki kemampuan untuk memproses dan mengembalikan sampah ke lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan, seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada rencana pengelolaan ini, TPA akan didesain ulang untuk berfungsi sebagai fasilitas pengisolasian sampah perkotaan yang aman sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.

Selain itu, sarana dan prasarana yang kurang memadai dimana jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) hanya sekitar 21 unit dan tidak tersebar merata. Beberapa kecamatan, seperti Bantarkawung, Sirampog, Tonjong, dan Banjarharjo bahkan tidak memiliki TPS sama sekali. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum dikelola secara modern, masih menggunakan sistem *open dumping*. Kondisi ini menunjukkan lemahnya kapasitas kelembagaan dalam penyediaan infrastruktur dasar.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes masih menghadapi kendala serius dalam hal jumlah dan kapasitas SDM, seperti jumlah petugas kebersihan tidak sebanding dengan luas wilayah pelayanan, serta SDM teknis dan manajerial belum memiliki pelatihan khusus dalam pengelolaan sampah modern, seperti pengelolaan 3R (*reduce, reuse, recycle*). Selain itu, lemahnya koordinasi antar instansi, seperti pada kasus di Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba menunjukkan adanya konflik antara masyarakat dan pemerintah desa terkait lokasi pembuangan sampah dan

sistem pengangkutannya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya forum koordinasi yang melibatkan masyarakat serta kurangnya komunikasi antara DLH Kabupaten Brebes, desa, dan kecamatan, dan desa terkait peran masing-masing.

Kapasitas kelembagaan menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat daerah. Di Kabupaten Brebes, pengelolaan sampah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menjalankan tugas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018. Namun, hingga saat ini kapasitas kelembagaan yang ada di Brebes masih menghadapi sejumlah keterbatasan.

Sebagai perbandingan, Kabupaten Banyumas di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kapasitas kelembagaan yang lebih baik dalam pengelolaan sampah. Banyumas telah membangun sistem kelembagaan yang kolaboratif antara pemerintah daerah, komunitas masyarakat, dan sektor swasta. Adanya bank sampah yang telah banyak tersebar di berbagai wilayah, Banyumas mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Selain itu, penerapan sistem retribusi sampah yang terstruktur turut mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung keberlanjutan program persampahan. Pada aspek sumber daya manusia, Kabupaten Banyumas memiliki petugas yang cukup memadai dan didukung oleh kader lingkungan yang aktif di masyarakat.

Research gap pada penelitian ini dimana masih sedikit penelitian yang secara spesifik menyoroti kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di

daerah tingkat kabupaten, termasuk di Kabupaten Brebes. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami tantangan dan solusi berbasis kelembagaan untuk meningkatkan pengelolaan sampah. Data empiris yang diperoleh dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan perbaikan sistem pengelolaan sampah di masa mendatang.

Pada beberapa tahun terakhir, persoalan persampahan di berbagai daerah menunjukkan kecenderungan semakin kompleks seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan pola konsumsi masyarakat. Berbagai penelitian terdahulu umumnya masih menempatkan permasalahan persampahan terutama pada dimensi teknis operasional, seperti keterbatasan sarana prasarana, teknologi pengolahan, maupun efektivitas sistem pengangkutan. Pendekatan tersebut memang penting. Namun, cenderung menyederhanakan persoalan, karena keberhasilan layanan persampahan pada hakikatnya tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, melainkan juga oleh kapasitas kelembagaan penyelenggaranya.

Pada perspektif kapasitas kelembagaan, kinerja layanan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi dalam mengelola sumber daya, mengoordinasikan aktor, serta menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan strategis. Persoalan teknis sering kali merupakan manifestasi dari keterbatasan kapasitas organisasi. Sayangnya, kajian yang secara spesifik menelaah kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai aktor kunci dalam penyelenggaraan layanan persampahan masih relatif terbatas, khususnya pada level pemerintah daerah.

Kesenjangan kajian ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan kondisi Kabupaten Brebes yang menghadapi beban timbulan sampah yang tinggi, sementara cakupan layanan dan efektivitas pengelolaan masih menghadapi berbagai tantangan. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan persampahan di Kabupaten Brebes tidak semata-mata persoalan teknis operasional, tetapi berpotensi berkaitan erat dengan kapasitas kelembagaan DLH dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengendalian layanan persampahan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang tidak hanya berhenti pada evaluasi aspek teknis, tetapi secara lebih mendalam menganalisis kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya dekonstruksi terhadap hambatan struktural kelembagaan DLH Kabupaten Brebes. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi kapasitas kelembagaan sektor persampahan serta kontribusi praktis bagi peningkatan kinerja layanan persampahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya ketidaksesuaian antara kompleksitas permasalahan persampahan di Kabupaten Brebes dengan kecukupan kapasitas kelembagaan DLH sebagai penyelenggara layanan. Beban timbulan sampah yang tinggi, cakupan layanan yang belum optimal, serta indikasi keterbatasan koordinasi dan sumber daya menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi tidak semata bersifat teknis, melainkan berkaitan dengan kemampuan

kelembagaan dalam mengelola fungsi layanan secara efektif. Namun demikian, hingga saat ini belum banyak kajian yang secara komprehensif menguji kapasitas kelembagaan DLH Kabupaten Brebes.

Selama ini, upaya penanganan sampah di Kabupaten Brebes cenderung didominasi oleh pendekatan teknis-material, seperti penambahan jumlah armada, pembangunan fisik TPS 3R, serta perluasan lahan TPA. Namun, fakta menunjukkan bahwa intervensi fisik tersebut belum mampu memberikan solusi yang berkelanjutan terhadap krisis persampahan daerah. Keberhasilan layanan persampahan pada hakikatnya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana prasarana, melainkan oleh kapasitas kelembagaan penyelenggaranya dalam mengelola modalitas organisasi. Hingga saat ini, kajian mengenai persampahan di Kabupaten Brebes masih terbatas pada aspek teknis operasional. Selama ini, studi mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes umumnya didominasi oleh pendekatan teknis-material yang berfokus pada solusi hilir, seperti optimalisasi jumlah armada pengangkut, perluasan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), atau efektivitas teknologi pengolahan sampah di TPS 3R.

Penelitian dengan orientasi teknis tersebut cenderung mengabaikan akar persoalan mengapa intervensi fisik yang telah dilakukan sering kali tidak berkelanjutan. Sebaliknya, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menggeser fokus analisis dari aspek 'apa yang kurang' (sarana fisik) menjadi 'mengapa sistem tidak berjalan' (kapasitas kelembagaan). Penelitian ini tidak hanya melihat keterbatasan fasilitas sebagai masalah mekanis, melainkan sebagai dampak

dari lemahnya modalitas organisasi, struktur regulasi, dan jejaring koordinasi. Perbandingan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah bukan sekadar soal kecanggihan teknologi, melainkan sejauh mana kapasitas kelembagaan mampu menggerakkan seluruh sumber daya secara sistemik dan adaptif.

Pada perspektif administrasi publik, persoalan teknis yang nampak di permukaan, seperti keterbatasan armada pengangkut, minimnya infrastruktur pengolahan hingga rendahnya kompetensi SDM di lapangan, pada hakikatnya merupakan manifestasi dari keterbatasan kapasitas organisasi dalam melakukan perencanaan strategis dan pengelolaan sumber daya. Masalah-masalah teknis tersebut bukanlah variabel tunggal yang berdiri sendiri, melainkan dampak langsung dari sistem kelembagaan yang belum mampu mengalokasikan modalitas organisasi secara optimal. Oleh karena itu, penyelesaian masalah sampah di Kabupaten Brebes tidak akan efektif jika hanya dilakukan melalui pendekatan reaktif seperti menambah sarana fisik semata. Upaya perbaikan harus menyentuh akar permasalahan yang paling mendasar, yaitu penguatan kapasitas kelembagaan. Adanya penguatan pada aspek regulasi, struktur organisasi, dan sumber daya manusia, diharapkan terbentuk sebuah sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga sistemik, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Sampah yang menumpuk di TPA yang tidak dapat diangkut dan dikelola sepenuhnya menimbulkan bau tidak sedap, kondisi kumuh, dan berbagai penyakit dan pencemaran. Kapasitas kelembagaan sangat penting untuk pengelolaan sampah

yang efektif. Namun, masih ada beberapa masalah dengan sarana dan prasarana, serta kekurangan sumber daya manusia yang membuat pengelolaan sampah kurang efisien. Mengingat betapa pentingnya pengelolaan sampah di suatu wilayah, diperlukan perencanaan komprehensif sebagai langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak masalah pengelolaan sampah yang belum terselesaikan, sekaligus menjadi bagian dari upaya untuk mengatasi masalah lingkungan perkotaan seiring dengan pertumbuhan wilayah yang cepat di Kabupaten Brebes. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Kapasitas Kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Brebes.

Identifikasi masalah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes, sebagai berikut:

- 1 Kondisi TPA Kaliwlingi *overload* serta minimnya sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan pemrosesan akhir sampah secara optimal.
- 2 Rendahnya rasio cakupan layanan persampahan yang baru menjangkau 21,38% wilayah Kabupaten Brebes.
- 3 Terbatasnya jumlah TPS 3R yang menghambat upaya pengurangan sampah sebelum masuk ke pembuangan akhir.
- 4 Belum optimalnya sinergi pengelolaan sampah antara sektor hulu (sumber/masyarakat) dan hilir (Pemerintah Daerah) yang diperparah dengan rendahnya kesadaran publik dalam memilah sampah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang paling dominan pada pengembangan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pengembangan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang paling dominan dalam kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes.

1.4 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan pembaca dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian terkait administrasi publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes mengoptimalkan pengelolaan sampah.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dengan cara yang benar dan tepat.

3. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini memberikan pengalaman baru yang memperluas cara berpikir, meningkatkan pemahaman, dan memungkinkan penulis menerapkan pengetahuan mereka dalam kehidupan sehari-hari dan di masa mendatang.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Judul, Tahun, dan Jurnal	Metode dan Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
1.	Zikri & Prasojo, <i>Strengthening Policy Capacity and Human-Centric Approaches Drives Successful Smart Governance Implementation</i> , 2026, Jurnal Ilmiah	Metode kualitatif analitis; menggunakan teori <i>policy capacity</i> dan <i>smart governance</i> (kapasitas individu, organisasi, dan sistem).	Penguatan kapasitas kebijakan dan pendekatan <i>human-centric</i> menjadi faktor kunci keberhasilan smart governance. Kendala utama terdapat pada koordinasi lintas sektor dan kesiapan SDM.	Penelitian Zikri berfokus pada <i>Smart Governance</i> dan pendekatan <i>human-centric</i> , sementara penelitian ini berfokus pada kapasitas kelembagaan dalam konteks layanan publik pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes.

	Manajemen Kesatuan			
2.	Sari & Wicaksono, <i>Capacity Building</i> Aparatur dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, 2021, Jurnal Administrasi Publik.	Kualitatif deskriptif, teori <i>capacity building</i> birokrasi.	Peningkatan kapasitas aparatur berdampak pada perbaikan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, tetapi masih terkendala distribusi SDM dan beban kerja.	Penelitian Sari berlokasi di Dispendukcapil Banyuwangi dengan fokus kinerja pelayanan kependudukan, sementara penelitian ini berfokus pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes dalam aspek pengelolaan sampah.
3.	Hidayat & Nurhayati, <i>Capacity Building</i> dalam Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021, Jurnal Administrasi Negara	Kualitatif deskriptif, teori <i>capacity building</i> sektor lingkungan.	Kapasitas DLH dalam pengelolaan sampah masih menghadapi kendala armada, SDM lapangan, dan partisipasi masyarakat, meskipun regulasi sudah memadai.	Meskipun sama-sama membahas pengelolaan sampah, perbedaan terletak pada lokasinya, yakni di Kota Makassar, sementara penelitian ini di Kabupaten Brebes serta adanya kedalaman analisis pada faktor pendukung/penghambat yang spesifik pada kondisi geografis Kabupaten Brebes.
4.	Mohammad Iqbal, Rita Myrna, & Elisa Susanti. Kapasitas Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dalam	Metode kualitatif deskriptif. Teori kapasitas organisasi Horton dkk. dengan lima aspek: SDM, sumber daya, kepemimpinan	Kapasitas organisasi dinas masih belum optimal sehingga mempengaruhi capaian produksi benih. Diperlukan penambahan pegawai, peningkatan kompetensi, dan penyesuaian anggaran.	Penelitian Iqbal berfokus pada sektor pertanian (benih padi) di Jawa Barat, sedangkan penelitian ini spesifik pada sektor lingkungan hidup dan penanganan limbah di tingkat daerah.

	Pengembangan Benih Padi Induk. 2023, JANE	, manajemen proses, dan jejaring.		
5.	Arifin & Syamsuddin, <i>Strengthening Institutional Capacity of the Sanitation Department in Balikpapan City</i> , 2021, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah	Kualitatif deskriptif; teori <i>institutional capacity</i> sektor publik.	Penguatan kapasitas kelembagaan menunjukkan kemajuan pada aspek regulasi dan organisasi. Meski demikian, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan SDM teknis dan sistem monitoring yang belum optimal.	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian di Kota Balikpapan, sementara penelitian ini memberikan kontribusi pada analisis kapasitas di wilayah dengan karakteristik jumlah penduduk tertinggi di Jawa Tengah (Brebes).
6.	Fadli, Amirullah & Mahmud, <i>Institutional Capacity of Waste Management in the Environmental Service of Palangka Raya City</i> , 2022, Jurnal Bina Praja	Pendekatan kualitatif dengan analisis kelembagaan; kerangka UNDP <i>capacity development</i> .	DLH Palangka Raya telah melakukan penguatan kapasitas melalui peningkatan sarana dan kompetensi aparatur. Kendala utama terletak pada sistem pengelolaan yang belum terintegrasi dan partisipasi masyarakat yang masih rendah.	Fadli menggunakan kerangka UNDP <i>capacity development</i> di Palangka Raya, sementara penelitian ini menggunakan teori Hall (2003), mencakup kapasitas SDM, keuangan, jaringan dan relasi, proses dan infrastruktur, serta perencanaan dan pengembangan di Kabupaten Brebes.
7.	Ahmad Faqih Abdallah & Dedi Sukarno. Kapasitas Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dalam Menerbitkan Dokumen Kependudukan. 2025, JANE	Pendekatan kuantitatif dengan teori Horton et al. (2003). Mengukur <i>variabel resources</i> dan <i>management</i> melalui kuesioner.	Kapasitas organisasi cukup kuat pada aspek manajemen, tetapi masih lemah pada SDM dan jejaring. Disarankan peningkatan pengelolaan SDM dan kemitraan eksternal.	Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali fenomena secara lebih mendalam melalui wawancara mendalam dan observasi.

8.	Mulyadi & Rahman, <i>Public Sector Capacity Building in Waste Service Management in Pontianak City</i> , 2022, Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi	Studi kualitatif; menggunakan perspektif <i>capacity building</i> sektor publik.	Kapasitas pengelolaan layanan persampahan mengalami peningkatan pada level individu dan organisasi. Namun, integrasi kebijakan dan dukungan teknologi informasi masih perlu diperkuat untuk meningkatkan kinerja layanan.	Penelitian Mulyadi menekankan pada level individu dan organisasi secara umum, sementara penelitian ini menganalisis hingga aspek kapasitas jaringan lintas sektor dan perencanaan strategis.
9.	Nur, Rahmawati & Ramadhan, <i>Pengembangan Kapasitas Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Baubau</i> , 2024, Administratio: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara	Kualitatif (wawancara, observasi, dokumentasi); teori pengembangan kapasitas organisasi	Penguatan kapasitas dilakukan melalui pengembangan SDM, restrukturisasi organisasi, dan reformasi kelembagaan. Namun, implementasinya belum optimal karena keterbatasan kompetensi teknis dan dukungan organisasi.	Berfokus pada pengembangan kapasitas UPTD Laboratorium di Kota Baubau, sementara penelitian ini mencakup kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup secara luas di Kabupaten Brebes.
10.	Desy Saptari, Elisa Susanti, Yogi Suprayogi, <i>Kapasitas Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam Mengembangkan Pariwisata Unggulan Kabupaten Tasikmalaya</i> , 2021, JANE (Jurnal	Metode kualitatif deskriptif. Menggunakan teori kapasitas organisasi Horton dkk. yang meliputi dimensi SDM, infrastruktur, teknologi dan keuangan, kepemimpinan strategis, manajemen	Kapasitas organisasi Disparpora Tasikmalaya belum sepenuhnya memadai. Kelemahan utama terdapat pada keterbatasan SDM, infrastruktur, teknologi, dan pendanaan yang berdampak pada lemahnya manajemen program dan jaringan kerja. Kepemimpinan strategis relatif cukup	Penelitian Desy berfokus pada sektor pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya, sementara penelitian ini secara khusus membedah tata kelola persampahan dan tantangan operasional TPA Kaliwlingi.

	Administrasi Negara)	program, serta jejaring.	baik tetapi masih perlu penguatan.	
11.	Putra, R. D., Darto., Halim, H. A. (2021). Kapasitas Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung. Jurnal Administrasi Negara, Volume 13 (1).	Metode kualitatif. Teori Hall (2003). Teori yang digunakan dalam penelitian ini menurut Michael Hall et. al (2003).	Studi ini menunjukkan bahwa organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Perencanaan dan Pengembangan, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Infrastruktur, dan Proses semuanya belum terpenuhi. Namun, kapasitas jaringan dan hubungan dapat dianggap terpenuhi. Tidak terpenuhinya kapasitas karena keterbatasan kompetensi pegawai yang mempengaruhi kapasitas lainnya.	Fokus penelitian Putra pada pengurangan kantong plastik di Kota Bandung, sementara penelitian ini memiliki fokus yang lebih luas, mencakup seluruh sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir (TPA) di Kabupaten Brebes.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya memiliki variasi lokus dan fokus kajian. Sebagian besar penelitian menitikberatkan pada kapasitas kelembagaan serta upaya penguatan atau pengembangannya dalam menangani berbagai permasalahan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sama-sama mengkaji kapasitas kelembagaan. Namun demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada kapasitas lembaga dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kemampuan

kelembagaan tersebut serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di daerah.

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena tidak hanya berhenti pada pemetaan kondisi kapasitas kelembagaan, melainkan mengembangkan rumusan analisis strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah di DLH Kabupaten Brebes. Pendekatan ini menjadikan penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga aplikatif. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat kemudian menyusunnya ke dalam strategi peningkatan kapasitas yang dapat dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan daerah secara lebih terarah. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah pada penyusunan strategi yang konkret dan kontekstual untuk penguatan kapasitas kelembagaan yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam penelitian terdahulu.

Kebaruan dari penelitian ini menunjukkan bahwa rekomendasi penguatan kapasitas kelembagaan di Kabupaten Brebes tidak dapat dilakukan secara seragam, perlunya asimetri kebijakan, yakni wilayah perkotaan menekankan pada penguatan kapasitas infrastruktur teknologi dan regulasi retribusi, sementara wilayah pedesaan lebih membutuhkan penguatan kapasitas jaringan (*networking*) berbasis komunitas dan kemitraan antar-desa.

1.5.2 Administrasi Publik

Nicholas Henry (Keban, 2014), administrasi publik adalah kombinasi rumit dari teori dan praktik yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang diperintah. Tujuan administrasi publik juga adalah untuk mendorong kebijakan publik untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

David H. Rosenbloom (2005) menjelaskan administrasi publik sebagai pemanfaatan proses dan teori politik, manajemen, dan hukum untuk memenuhi keinginan legislatif dan eksekutif pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan dan sebagian (Pasolong, 2014).

Dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah interaksi dinamis antara unit organisasi, baik secara teori maupun melalui proses manajemen formal dan informal. Administrasi publik berkaitan dengan peraturan hak, kewajiban, dan tugas, serta proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry (Keban, 2014), ada enam paradigma yang berbicara tentang administrasi publik, di antaranya:

Paradigma 1 (Dikotomi Politik dan Administrasi) 1900–1926: Frank J. Goodnow dan Leonard D. White adalah tokoh yang terkenal dalam dikotomi ini, yang berpendapat bahwa politik harus berfokus pada kebijakan yang mencerminkan kehendak masyarakat. Paradigma ini memberikan penekanan yang lebih besar pada

komponen lokus, yaitu birokrasi pemerintahan. Namun, kurangnya diskusi yang mendalam tentang topik atau pendekatan yang harus diterapkan oleh administrasi publik.

Paradigma 2 (Prinsip-prinsip Administrasi) berlangsung dari tahun 1927 hingga 1937. Tokoh-tokoh dalam paradigma ini termasuk Willoughby, Gullick & Urwick, Fayol, dan F.W. Taylor, yang menyatakan bahwa prinsip administrasi merupakan dasar dari administrasi publik. Meskipun lokusnya tidak jelas, prinsip administrasi yang terkenal dari Gullick dan Urwick, POSDCORB (Planning, Organization, Staffing, Directing, Reporting, and Budgeting), menurut mereka dapat diterapkan secara umum.

Paradigma 3 (Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik) 1950-1970: Morstein Marx, editor buku *Elements of Administration* tahun 1946, bertanya apakah pemisahan antara administrasi dan politik itu mungkin atau tidak mungkin. Hebert Simon, di sisi lain, mengkritik prinsip administrasi yang tidak konsisten dan menyatakan bahwa mereka tidak dapat diterapkan secara luas. Paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik, dengan birokrasi pemerintahan sebagai lokus utamanya, muncul sebagai hasil dari konflik ini. Namun, karena prinsip administrasi publik dianggap memiliki kelemahan, fokusnya menjadi kabur.

Paradigma 4 (Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi) 1956–1970: Prinsip manajemen populer dikembangkan dengan lebih ilmiah. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi canggih, dan penelitian

operasi adalah fokus utama dari paradigma ini. Model ini berfokus pada penciptaan ilmu administrasi murni yang didukung oleh psikologi sosial dan kebijakan publik.

Paradigma 5 dikenal sebagai Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara dari tahun 1970-an hingga sekarang—memiliki fokus dan lokus yang jelas. Model ini berfokus pada masalah kepentingan publik dan mencakup teori kebijakan publik, teori organisasi, dan teori manajemen.

Paradigma 6 (Governance) 1990-sekarang adalah pendekatan terakhir. Pada pendekatan ini, "governance" mengacu pada cara penguasa politik menggunakan kekuasaan atau otoritas untuk mencapai kesejahteraan masyarakat suatu negara. Proses yang kompleks ini memungkinkan pemerintah langsung menerapkan kebijakan publik. Hal ini mempengaruhi lembaga dan individu, serta dapat berdampak pada pembangunan ekonomi dan sosial.

1.5.4 Manajemen Publik

Manajemen publik adalah penerapan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Menurut Mary Parker Follett dalam Nawawi (2000), manajemen adalah seni melakukan banyak hal. Menurut Shafritz dan Russel, manajemen adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan organisasi serta mekanisme yang diperlukan untuk menjalankan organisasi, dengan memanfaatkan potensi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya, seorang manajer bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi dengan melibatkan orang lain untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, baik secara individu maupun bersama.

Menurut George R. Terry dalam Safroni (2012), manajemen adalah mekanisme khusus yang terdiri dari berbagai tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian, dan dilakukan untuk mencapai dan menentukan tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Jawangga (2019) menyatakan bahwa manajemen berfungsi sebagai steering wheel untuk sebuah perusahaan, dan digunakan untuk mengatur, mengorganisasi, dan mengarahkan keseluruhan proses bisnis.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, manajemen dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi saat ini dengan mengoptimalkan kemampuan dan potensi sumber daya yang tersedia. Manajemen publik berfokus pada bagaimana kebijakan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik dan memberdayakan.

Pelayanan dan barang publik diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara melalui sistem manajemen publik. Sub-sistem lain, seperti sistem ekonomi, hukum, politik, sosial, dan budaya, memengaruhi manajemen publik. Manajemen publik adalah studi interdisipliner yang mencakup berbagai aspek organisasi umum dan menggabungkan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Pemanfaatan sumber daya, anggaran, fisik, informasi, material, dan politik adalah beberapa elemen yang diatur di dalamnya (Keban, 2014).

1.5.5 Pengelolaan Sampah

Sampah adalah bahan yang dibuang atau terbuang dari proses alam dan aktivitas manusia yang tidak memiliki nilai ekonomis. Sampah, di sisi lain, dapat dianggap sebagai bahan yang tidak lagi digunakan, tidak disukai, atau telah dibuang, yang berasal dari aktivitas manusia dan tidak muncul secara alami. Pengelolaan sampah adalah upaya untuk menciptakan keindahan dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pengelola bekerja sama dengan baik. Alex (Arifin, Syah, & Barlian, 2019) menyatakan bahwa berbagai tindakan seperti pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, daur ulang, dan pembuangan sampah termasuk dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah proses yang berkelanjutan, sistematis, dan menyeluruh yang mencakup pengelolaan dan pengurangan sampah untuk mengubahnya menjadi sumber daya dan meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Seperti yang dijelaskan dalam "Pengelolaan Sampah" oleh Apricia, Jeremiah, dan Trinovada (2023), pengelolaan sampah mencakup seluruh proses pengelolaan sampah dari sumbernya hingga pembuangan akhir, yang mencakup pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan, serta pengawasan dan peraturan yang berkaitan dengan manajemen sampah. Pengurangan dan penanganan sampah terkait erat dengan pengelolaan sampah. Pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah adalah cara-cara untuk mengurangi sampah.

1.5.6 Kapasitas Kelembagaan

Kapasitas kelembagaan merujuk pada kemampuan setiap elemen atau kegiatan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan berkelanjutan (Abidin, 2021). Kapasitas kelembagaan dapat memperkuat internal organisasi melalui berbagai elemen yang saling mempengaruhi dan terhubung satu sama lain. Kapasitas kelembagaan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Horton dkk. (2003) menyatakan bahwa kapasitas kelembagaan merupakan kemampuan organisasi untuk menjalankan fungsi, menyelesaikan permasalahan, serta menentukan dan mewujudkan tujuan secara berkelanjutan. Pengertian ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, tetapi juga menyangkut kemampuan organisasi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal. Selain itu, Grindle (1997) menjelaskan bahwa kapasitas kelembagaan adalah kemampuan lembaga dalam menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kapasitas kelembagaan dapat dipahami sebagai kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, melaksanakan fungsi, dan mencapai tujuan secara efektif serta berkelanjutan.

Menurut Riyadi (Hani & Safitri, 2019), ada empat komponen yang mempengaruhi kapasitas kelembagaan. Mereka adalah sebagai berikut:

- 1) Komitmen bersama

Hal ini modal dasar yang harus dipertahankan dan dikembangkan secara konsisten untuk menjadi dasar dari semua rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh suatu organisasi.

2) Kepemimpinan

Hal ini menjadi modal tambahan yang menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dapat dilaksanakan secara efektif.

3) Reformasi Peraturan

Peraturan dan aturan hukum formal membantu pemerintah daerah menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan dalam keadaan yang baik sangat penting untuk mendukung kapasitas kelembagaan.

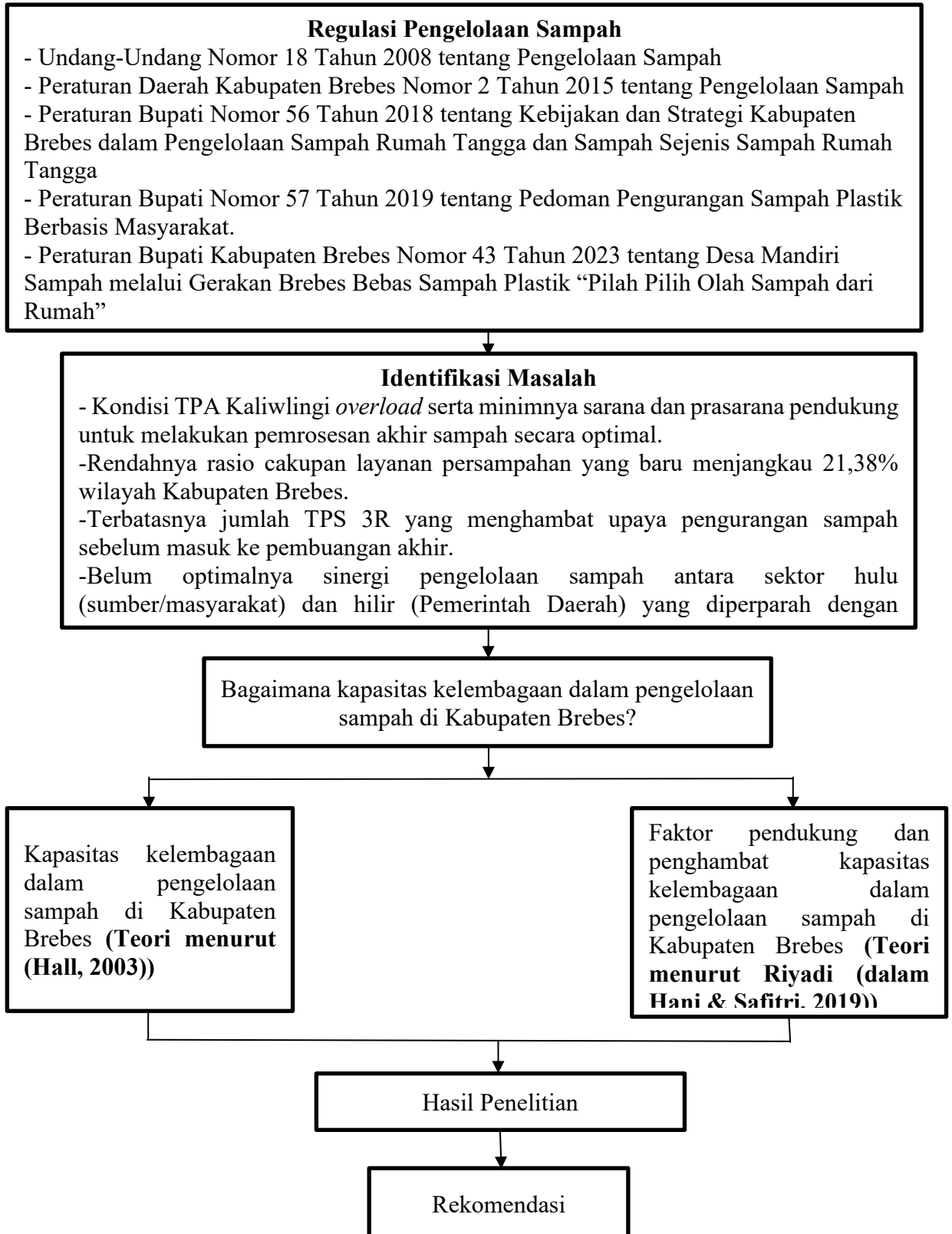
4) Reformasi Kelembagaan

Untuk mencapai tujuan organisasi, program kapasitas harus dilaksanakan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan kapasitas di tingkat kelembagaan dan individu.

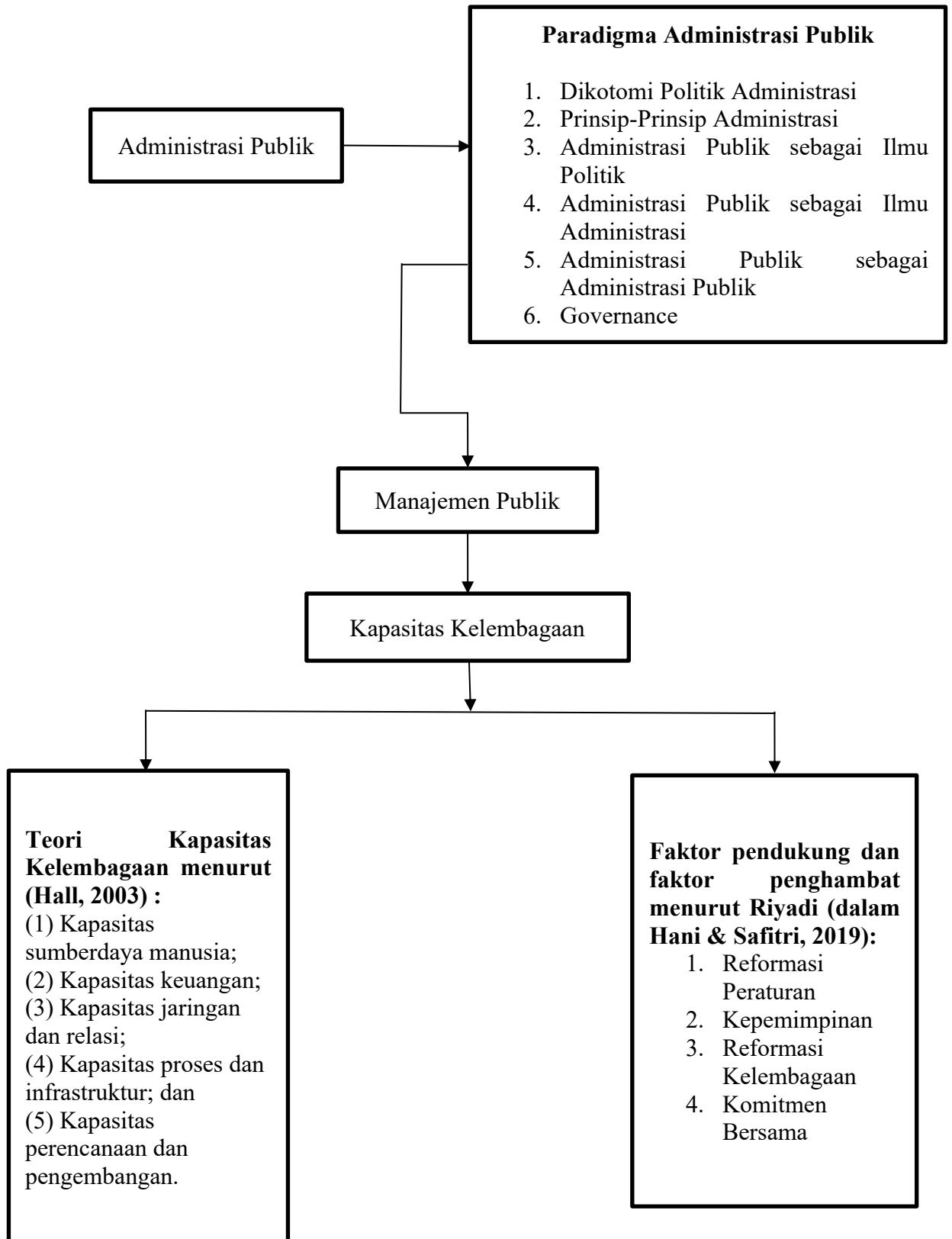
Untuk menentukan kapasitas kelembagaan, peneliti menggunakan teori kapasitas lembaga menurut (Hall, 2003) yang menjelaskan terdapat dimensi-dimensi kapasitas organisasi yakni: (1) kapasitas sumberdaya manusia; (2) kapasitas keuangan; (3) kapasitas jaringan dan relasi; (4) kapasitas proses dan infrastruktur; dan (5) kapasitas perencanaan dan pengembangan. yang kemudian penulis gunakan untuk menganalisis penelitian ini tentang Kapasitas Kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Brebes.

1.6 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1. 5 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1. 6 Kerangka Teori



1.7 Definisi Konsep

Kapasitas kelembagaan merupakan kemampuan suatu lembaga atau organisasi dalam mengelola sumber daya, menetapkan kebijakan, dan melaksanakan fungsinya secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan demi memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

1.8 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 2 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati
Kapasitas Kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Brebes	Kapasitas Sumber Daya Manusia	Dimensi ini menganalisis kemampuan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes dalam menjalankan tugasnya secara efektif, mencakup: <ul style="list-style-type: none">- Jumlah pegawai yang bertugas dalam pengelolaan sampah- Tingkat pendidikan dan keahlian pegawai di bidang pengelolaan sampah- Pelatihan yang diberikan kepada pegawai terkait pengelolaan dan pengolahan sampah- Produktivitas pegawai dalam pengangkutan dan pemrosesan sampah
	Kapasitas Keuangan	Dimensi ini menganalisis kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes dalam mendapatkan, mengalokasikan, dan mengelola anggaran untuk pengelolaan sampah, mencakup : <ul style="list-style-type: none">- Besaran anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes- Kemampuan DLH dalam mencari sumber pendanaan alternatif, seperti dana CSR, hibah

		<ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi penggunaan anggaran dalam program pengelolaan sampah - Ketersediaan dana untuk pembelian alat dan kendaraan pengangkut sampah - Tingkat penyerapan anggaran.
	Kapasitas Jaringan dan Relasi	<p>Dimensi ini menganalisis kemampuan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes dalam membangun dan memanfaatkan hubungan dengan berbagai pihak terkait dalam pengelolaan sampah, mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerja sama dan kejelasan peran dengan sektor swasta, akademisi, OPD terkait, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah - Keterlibatan masyarakat atau komunitas bank sampah dalam pengelolaan sampah - Kemitraan dengan perusahaan daur ulang atau industri pengolahan sampah - Koordinasi antar lembaga terkait (DLHK, kecamatan, kelurahan, dan dinas lain) - Partisipasi dalam forum atau jejaring pengelolaan sampah di tingkat regional/nasional
	Kapasitas Proses dan Infrastruktur	<p>Dimensi ini menganalisis ketersediaan sarana, prasarana, serta sistem operasional yang mendukung pengelolaan sampah secara efektif, mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan kondisi armada pengangkut sampah - Ketersediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce-Reuse-Recycle</i> (TPS 3R) - Sistem pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat rumah tangga dan fasilitas umum - Digitalisasi atau teknologi yang digunakan dalam sistem pengelolaan sampah

		- Prosedur standar operasional dalam pengelolaan sampah
	Kapasitas perencanaan dan pengembangan	Dimensi ini menganalisis kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes dalam menyusun strategi dan kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang terkait pengelolaan sampah, mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan dokumen perencanaan strategis terkait pengelolaan sampah (RPJMD, Renstra DLHK) - Program inovasi pengelolaan sampah yang dikembangkan oleh pemerintah daerah - Evaluasi dan monitoring terhadap kebijakan pengelolaan sampah yang telah diterapkan - Fleksibilitas kebijakan menghadapi permasalahan sampah baru - Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sampah
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kapasitas Kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Brebes	Reformasi Peraturan	Dasar regulasi yang mengatur atau yang menjadi landasan pelaksanaan pengelolaan sampah.
	Kepemimpinan	Peran dan wewenang pemimpin. Keikutsertaan aktor untuk mendukung keberhasilan tujuan organisasi.
	Reformasi Kelembagaan	Iklm dan budaya kerja.
	Komitmen Bersama	Keikutsertaan aktor untuk mendukung keberhasilan tujuan organisasi.

Sumber : Data Diolah (2024)

1.9 Argumen Penelitian

Pada pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan sampah harus menjadi salah satu prioritas utama. Selain itu, dalam menangani masalah sampah di Kabupaten Brebes, pemerintah menjadi sektor utama. Volume sampah rumah tangga di Kabupaten Brebes telah meningkat secara signifikan selama empat tahun terakhir. Bahkan permasalahan ini diperburuk oleh TPA Kaliwlingi yang *overload*.

Setiap hari TPA Kaliwlingi menerima volume sampah yang signifikan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Brebes. Akibatnya, lokasi pembuangan sampah terbesar di Kabupaten Brebes dapat mengalami *overload* atau kelebihan kapasitas yang berarti bahwa TPA tersebut tidak mampu lagi menampung volume sampah yang terus meningkat. Oleh karena itu, elemen penting yang harus segera dilakukan adalah manajemen pengelolaan sampah melalui lembaga dan UPT. Penelitian ini dibutuhkan mengingat masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes menjadi salah satu masalah utama dalam hal pelestarian lingkungan.

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes. Subjek penelitian ini termasuk Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, dan Pengendalian Pencemaran, Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Brebes, Pejabat Fungsional, dan Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Kebersihan dan Persampahan.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Studi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Walidin, Saifullah, dan Tabrani (Fadli, 2021), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau manusia dengan membuat gambaran lengkap yang disampaikan dalam kata-kata, menyampaikan pandangan detail dari informan, dan dilakukan di lingkungan alami. Sebagaimana dijelaskan oleh Burns, tujuan penelitian kualitatif bersifat eksploratif dan deskriptif, yang memungkinkan peneliti mengungkap realitas sosial secara lebih komprehensif.

Metode kualitatif deskriptif dipilih dalam penelitian ini karena fokus utamanya adalah untuk memahami proses kelembagaan dalam pengelolaan sampah secara mendalam, meliputi bagaimana kebijakan diterapkan, bagaimana koordinasi antarinstansi berjalan, serta bagaimana dinamika antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku lainnya terjadi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara langsung pengalaman, perspektif, dan praktik yang dijalankan oleh para pelaku kelembagaan di Kabupaten Brebes. Selain itu, pendekatan deskriptif digunakan agar dapat menggambarkan kondisi empiris yang ada, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah, serta merumuskan strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes.

1.10.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian juga berfungsi sebagai sumber data dan aktivitas penelitian. Untuk lokasi penelitian ini, peneliti memilih Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes, yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.163, Kauman, Brebes, Kec. Brebes. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi aktual di mana DLH Kabupaten Brebes masih menghadapi berbagai permasalahan dalam kapasitas kelembagaan, khususnya dalam pengelolaan sampah. Permasalahan tersebut mencakup keterbatasan sumber daya manusia yang menangani pengelolaan sampah, minimnya anggaran operasional, serta belum optimalnya infrastruktur dan sistem pendukung, seperti sarana pemilahan, pengangkutan, dan pemrosesan sampah. Selain itu, koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah juga masih rendah yang menunjukkan adanya kelemahan dalam dimensi kapasitas jaringan dan relasi. Kondisi ini berdampak pada belum tercapainya target pengurangan dan penanganan sampah secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, DLH Kabupaten Brebes menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana kapasitas kelembagaan dibentuk, didukung, dan ditingkatkan dalam konteks pengelolaan sampah daerah.

1.10.3 Subjek Penelitian

Informasi tentang penelitian berasal dari subjek penelitian. Subjek digunakan untuk memberikan data dan informasi tentang kondisi di lokasi penelitian (Nugrahani, 2014). Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan tujuan dan

pertimbangan khusus (Sugiyono, 2020). Fokus penelitian ini adalah pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes. Subjek penelitian ini, yakni seluruh pihak yang mengetahui terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes.

1.10.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang dapat diamati, dicatat, atau direkam. Informasi tentang kemampuan informan dalam pengelolaan sampah diuraikan dan dianalisis.

1.10.5 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara atau kuesioner. Informan atau orang yang menjawab pertanyaan peneliti, baik secara lisan maupun tertulis dianggap sebagai sumber data primer (Ramadhani, 2019). Informan tersebut mencakup seluruh pihak yang mengetahui terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dokumen penting, hingga sumber dari website resmi atau internet. Data ini dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang penelitian (Samsu, 2017). Sumber data sekunder tersebut, meliputi:

1. Dokumen peraturan dan kebijakan, seperti Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah, Peraturan Bupati, serta dokumen

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes.

2. Laporan resmi instansi, seperti laporan tahunan DLH Kabupaten Brebes, laporan kinerja, dan laporan realisasi program pengelolaan sampah.
3. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang memberikan informasi mengenai jumlah timbulan dan pengelolaan sampah daerah.
4. Data statistik daerah, seperti data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes yang memuat data jumlah penduduk, kondisi lingkungan, dan infrastruktur pendukung.
5. Sumber dari situs resmi pemerintah atau lembaga terpercaya, seperti KLHK, BPS, dan Pemerintah Kabupaten Brebes, yang digunakan untuk mendapatkan data terbaru dan valid sebagai pendukung analisis.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, termasuk wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi atau studi pustaka (Samsu, 2017). Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, diantaranya:

- a. Wawancara

Wawancara melibatkan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan tentang topik penelitian. Arikunto (Samsu, 2017) menggambarkan

wawancara sebagai percakapan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari informan. Semua orang yang terlibat dalam proses pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes diwawancarai. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan panduan pertanyaan yang fleksibel sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi lebih dalam pandangan, pengalaman, dan praktik informan terkait kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah. Informan yang diwawancarai mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes, seperti pejabat Dinas Lingkungan Hidup, petugas pengelola sampah, serta tokoh masyarakat setempat.

b. Observasi Langsung

Observasi langsung dilakukan dengan cara mengamati aktivitas nyata yang berkaitan dengan proses pengelolaan sampah di lapangan. Menurut Samsu (2017), observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan sistematis terhadap fenomena sosial yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada lokasi-lokasi penting seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Tempat Pengolahan Sampah (TPS), serta kegiatan pengangkutan, pemilahan, dan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh petugas maupun masyarakat. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran faktual tentang pelaksanaan pengelolaan

sampah, memverifikasi data wawancara, serta mengidentifikasi praktik kelembagaan yang berlangsung di Kabupaten Brebes.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mengumpulkan data melalui pencarian data yang relevan, seperti buku, catatan, majalah, transkrip, surat kabar, dan dokumen lainnya (Samsu, 2017). Peneliti mengumpulkan data melalui informasi dari artikel, jurnal, majalah, buku, dan dokumen penting yang berkaitan dengan kemampuan Kabupaten Brebes untuk mengelola sampah. Teknik dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat data hasil wawancara dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data menggunakan komponen analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2020), diantaranya

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pada penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan kunci yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan sampah, seperti pejabat dan staf teknis di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes, pengelola bank sampah, petugas lapangan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan wawancara ini ialah untuk menggali informasi yang mendalam mengenai kondisi kapasitas

kelembagaan, kendala yang dihadapi, serta pandangan informan terhadap strategi peningkatan kapasitas lembaga. Selain itu, metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen penting, seperti laporan kinerja, peraturan daerah, rencana strategis, data capaian target pengelolaan sampah, serta dokumen resmi lainnya yang relevan. Kedua metode ini saling melengkapi guna memperoleh pemahaman yang utuh dan valid mengenai kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes.

b. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, menyusuri pola dan tema, dan mengabaikan hal-hal yang tidak diperlukan agar kemudian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Pada saat mereduksi, masalah tertentu harus dibatasi, dan data harus disortir dengan memilih yang penting, baru, berguna, dan menarik untuk kemudian menjadi subjek penelitian.

c. *Display Data* (Penyajian Data)

Menguraikan, membuat bagan, dan menentukan hubungan antar kategori data yang telah direduksi untuk membuat fenomena yang diamati lebih mudah dipahami. Teori induktif dapat ditemukan berdasarkan data lapangan jika hipotesis yang dirumuskan didukung.

d. *Drawing Conclusions* (Penarikan Kesimpulan)

Hasil dari pengumpulan data, termasuk sebab akibat, alur, dan proporsi lainnya, diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau inovatif.

1.10.8 Kualitas Data

Metode triangulasi digunakan untuk menguji kualitas data penelitian ini. Triangulasi adalah metode untuk memeriksa validitas data dengan berbagai data, teori lebih dari satu, dan teknik analisis. Ini juga dapat melibatkan banyak peneliti untuk mengelola hasil penelitian (Fadli, 2021). Menurut William Wiersma (Sugiyono, 2020), metode triangulasi, meliputi:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah metode untuk mengevaluasi validitas data menggunakan beberapa sumber sebelumnya atau sumber lain. Pada penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes. Informan yang diwawancarai, meliputi pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup, petugas pengelola sampah, tokoh masyarakat, dan pihak lainnya yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Maka dari itu, peneliti dapat memperoleh pandangan yang lebih luas dan mengurangi bias yang hanya muncul dari satu sumber informasi saja.

b. Triangulasi Teknis

Triangulasi teknis adalah upaya untuk menguji keabsahan data dengan memeriksa dan membandingkan data yang diperoleh dengan berbagai metode atau teknik. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa

teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dari wawancara dengan informan yang berbeda akan diperiksa dan dibandingkan dengan hasil observasi lapangan dan analisis dokumen sehingga peneliti dapat memverifikasi hasil penelitian untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan yang diperoleh dari berbagai metode.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah upaya untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dalam waktu yang berbeda. Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data pada berbagai waktu yang berbeda selama proses pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes berlangsung. Adanya pemeriksaan data yang dikumpulkan dalam periode waktu yang berbeda, peneliti dapat mengidentifikasi perubahan, dinamika, atau tren yang terjadi dalam pengelolaan sampah seiring berjalannya waktu, dan memastikan bahwa temuan yang diperoleh tidak terpengaruh oleh waktu atau kondisi tertentu yang dapat membatasi keabsahan data.